



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-40.KP.03.04 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/563/M.SM.02.00/2020 tanggal 09 September 2020 hal Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.4-KP.03.04-110 tanggal 19 Juli 2022, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah mengikuti pelatihan dan telah lulus uji kompetensi untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO

NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Pembuat Daftar Gaji Kantor yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-40.KP.03.04 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 Agustus 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	ZEMBAR EKO SAPUTRA, S.E. NIP. 199512012020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	0
2.	MUHAMMAD IKHSAN PURNAMA SARI, S.Ak. NIP. 199604042020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	0
3.	SULTIAH MUKTI SARI, S.E. NIP. 199505262020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	0
4.	SAMUEL MATHEUS SOTARDUGA, S.E. NIP. 199011242020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	0
5.	BIMA VIKTOR GOKLAS SIMANGUNSONG, S.E. NIP. 199510302020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	0
6.	RIYANI SURYANINGSIH, S.E. NIP. 199508202020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	0
7.	RUMANTI HIDAYAH, S.E. NIP. 198706042020122001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	0
8.	ISNA KHOIRUL HIDAYAT, S.Sos. NIP. 199612212020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	0
9.	BASKORO ADI PRAKOSO, S.E. NIP. 199208122020121001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	0



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002